

ASAL USUL

Aceh

TIDAK semua kebenaran dapat diuji atau dibuktikan di sembarang waktu atau tempat. Juga tidak kepada mereka yang pada dasarnya tidak siap mendengar atau tidak menghendaki kebenaran itu terbukti, karena arena kepentingannya terancam.

Penderitaan rakyat Aceh, dan laporan yang diungkapkan belakangan, memberikan pelajaran gamblang tentang kesulitan mengungkapkan kebenaran. Sampai sekarang baru sedikit sekali yang dapat dan telah kita dengar tentang penderitaan rakyat Aceh dari berbagai tindak kekerasan dan pelecehan seksual di masa Orde Baru.

Tetapi yang sedikit itu pun sudah mengingatkan sejumlah hal penting. Kita diingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa yang terjadi di Jakarta dan kota lain Mei lalu merupakan kekerasan politik terorganisir yang pertama, yang terbesar, atau yang terburuk di negeri ini.

Kita belum tahu. Kita mungkin juga tidak akan cukup tahu dalam waktu dekat seberapa berat derita para korban kekerasan politik negeri di tanah Rencong itu.

Ada kemungkinan lain dari laporan media massa setelah kunjungan Tim Pencari Fakta DPR RI ke Aceh bulan lalu. Kebenaran tentang kekerasan politik negara tidak dapat terbongkar secara mendadak, utuh, dan tuntas sekaligus. Beberapa gadis kecil diperkosa, hamil, dan melahirkan anak. Ratusan orang diculik.

Ribuan orang disiksa dan dibunuh secara keji. Tetapi baru setelah lewat beberapa tahun, hal-hal itu dibongkar media massa resmi dan dibahas para wakil rakyat secara agak terbuka.

Ada seorang gadis korban perkosaan yang ditekan untuk menandatangani "surat damai" dengan pemerkosanya. Ia diberi ganti-rugi setengah juta rupiah dengan syarat tidak akan menggugat si pemerkosa. Penandatanganan surat yang dikarang sepihak oleh pemerkosa itu dilaksanakan sejumlah pemuka setempat. Tidak ada yang lebih bodoh daripada mempertanyakan mengapa si korban perkosaan atau para saksi yang bersimpati padanya tidak melapor kepada pihak polisi dari dulu-dulu.

Sampai hari ini pun Aceh tidak sepenuhnya bebas dari trauma, keraguan, atau ketakutan untuk mengungkapkan deritanya. Sebagian hal ini disebabkan karena ancaman terhadap keselamatan mereka masih berlanjut. Parahnya lagi, pihak yang diberi kesaksian tidak selalu menunjukkan sikap terbuka, kemampuan memahami, dan bersimpati pada korban.

Seorang kepala desa (keuchiek) setempat pernah mengeluh bahwa baru satu pertanyaan dari pihak Tim Pencari Fakta dijawab, penanya sudah menengajak berbantah atau membuat berbagai versi kesimpulan yang tidak selalu menguntungkan korban.



PENGALAMAN rakyat Aceh jelas tidak unik. Kita masih perlu bersabar menantikan lebih banyak kisah-kisah yang mengganggu selera makan dan tidur dari Irian Jaya atau Timor Timur. Atau kisah-kisah dari pembakaran terhadap sekian banyak tempat ibadah dalam dua atau tiga tahun terakhir.

Sudah lebih dari 30 tahun jutaan rakyat Indonesia tidak bersuara mengungkapkan kekerasan politik 1965-1967 yang menjadi landasan berdirinya Orde Baru. Kita sudah mendengar sedikit-sedikit kisah penahanan massal, penyiksaan massal, pembantaian massal, atau penguburan massal.

Kita baru sedikit-sedikit mendengar kisah perkosaan terhadap para perempuan dari masa itu. Dibutuhkan lebih dari 10 tahun bagi gugatan publik agar kasus Tanjungpriok dibongkar kembali. Pembunuhan "terorganisir dan sistematis" terhadap sekian banyak warga negara di tahun 1983-1984 — yang dikenal dengan nama "penembakan misterius" — masih lebih banyak terbungkam dalam bisu. Sama sekali tidak mengherankan bila belum semua saksi ataupun korban penculikan aktivis pro-demokrasi 1997-1998 angkat bicara. Apalagi para korban perkosaan Mei 1998.

Tepat yang dikatakan sejumlah aktivis perempuan bahwa meminta para korban perkosaan Mei itu sekarang bersaksi sama dengan mengulangi kembali perkosaan terhadap mereka. Kita belum tahu berapa puluh tahun dibutuhkan sebelum kisah-kisah perkosaan massal Mei 1998 dapat dibuka tanpa emosi meledak-ledak. Kaum perempuan korban kejahatan seksual selama penjajahan Jepang baru lantang menggugat keadilan sesudah setengah abad berlalu.

BARU-baru ini seorang wartawan asing bertanya pada saya, apakah menurut saya ada kemungkinan bagi para korban perkosaan Mei lalu mendapatkan keadilan. Saya merasa tak berhak menjawab. Saya tak yakin mampu memahami keadilan macam apa yang diharapkan para korban, jika mereka memang berharap sesuatu. Tetapi jika diberi izin berpendapat, dengan sedih saya berikan jawaban "tidak". Ini bukan berarti kasus itu kita diamkan saja.

Mengharapkan keadilan bagi para korban perkosaan Mei 1998?

Apalagi lewat prosedur hukum dan memberikan kesaksian korban? Ini lebih sulit daripada membayangkan matahari terbit dari ufuk Barat dan tenggelam di Timur.

Apa yang lebih absurd daripada mengharapkan para korban perkosaan Mei 1998 tampil suka rela memberikan laporan kesaksian pada saat ini? Di sejumlah negara yang lembaga peradilannyanya relatif dianggap punya kewibawaan, kemandirian, dan kearifan sudah teramat sulit bagi korban perkosaan mengharap (janganakan mendapatkan) keadilan. Apalagi di negeri yang amburadul lembaga peradilannyanya.

Setelah bertahun membisu, kesaksian para korban perkosaan Aceh membuka sebuah jendela. Kita akan menyaksikan kinerja lembaga negara dan sejauh mana "keadilan" dapat diberikan kepada kaum perempuan korban kekerasan politik di negeri Pancasila. Untuk sementara, timbunan para korban lain dari kerusuhan Mei 1998 atau puluhan peristiwa lain hanya menunggu dan membisu.

Ariel Heryanto